

**JURNAL**  
**REALISASI HAK NARAPIDANA UNTUK MENYAMPAIKAN KELUHAN**  
**ATAS PERLAKUAN SESAMA NARAPIDANA DI LEMBAGA**  
**PEMASYARAKATAN KELAS IIA WIROGUNAN**



**Disusun Oleh :**  
**WAHYU HIDAYAT NURDIN**

**NPM** : **070509649**  
**Program Studi** : **IlmuHukum**  
**Program Kekhususan** : **Peradilan Dan Penyelesaian**  
**SengketaHukum**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA**  
**2015**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JURNAL**

**REALISASI HAK NARAPIDANA UNTUK MENYAMPAIKAN KELUHAN  
ATAS PERLAKUAN SESAMA NARAPIDANA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS IIA WIROGUNAN**



**Disusun Oleh :**

**WAHYU HIDAYAT NURDIN**

**NPM : 070509649**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan Dan Penyelesaian  
Sengketa hukum**

**Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing**

**Pada Tanggal 25 Juni 2015**

**Dr.G.Widiartana, SH.,M.Hum**

**REALISASI HAK NARAPIDANA UNTUK MENYAMPAIKAN KELUHAN  
ATAS PERLAKUAN SESAMA NARAPIDANA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS IIA WIROGUNAN**

**Wahyu Hidayat Nurdin**

**Dr. G. Widiartana, SH.,M.Hum**

**Ilmu Hukum/ Fakultas Hukum/ Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**ABSTRACT**

Realization of prisoner's rights in Indonesia is mentioned in constitution No. 12/1995 about society. The rights as a prisoner are related to human rights. The problems that will be discussed in this paper is about how was the realization of the prisoner's right to convey complains relate to another prisoner's unpleasant behavior against him or her in penitentiary class IIA Wirogunan and what factors that obstruct that realization. The method that used by this research is based on empirical study where the data obtained from this research are using primary and secondary data. Qualitative analysis is used in this research with inductive thinking method used for the conclusion. According to the analysis that have been done, we can conclude

that the realization of prisoner's right to convey complains relate to another prisoner's unpleasant behavior against him or her in prison class IIA Wirogunan is not perfectly fulfilled because there many obstacle factors such as the lack of socialization to the prisoners about this rights regulation, there was no working system improvement of the penitentiary that can facilitate overall complains, the lack of monitoring from the supervisory judge. Monitoring of penitentiary performance that appropriate with operational procedure must be implemented by the supervisory judge regularly once in three months.

Keywords : realization, behavior, prisoner's rights

## **A. Latar Belakang**

Dalam sistem hukum negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi hanya sekedar penjeraan bagi narapidana, tetapi merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi melakukan tindak pidana di masa yang akan datang. Pancasila sebagai landasan idiil dari sistem pemasyarakatan, menyebutkan perlu adanya keseimbangan dan keselarasan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungannya dengan masyarakat, hubungannya dengan alam, dengan bangsa-bangsa lain maupun hubungannya dengan Tuhan.

Tujuan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan adalah pembentukan warga binaan menjadi manusia yang seutuhnya, perbaikan diri, dan aktif dalam pembangunan, serta hidup wajar sebagai warga negara dan bertanggung jawab. Menurut Romli Atmasasmita, tujuan penghukuman adalah mencegah seseorang melakukan kejahatan dan bukan merupakan

pembalasan.<sup>1</sup>Fungsi pembinaan adalah menjadikan warga binaan menyatu (integral) dengan sehat dalam bermasyarakat serta dapat berperan bebas dan bertanggung jawab. Adapun maksud dari manusia seutuhnya adalah narapidana atau anak pidana sebagai individu yang diarahkan fitrahnya untuk menjalin hubungan dengan Tuhan serta lingkungan. Sedangkan definisi terintegrasi secara sehat dapat diartikan sebagai pemulihan hubungan-hubungan warga binaanpemasyarakatan dengan masyarakat.<sup>2</sup>

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak narapidana merupakan bagian terpenting dalam proses pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta Peraturan Pelaksananya. Sejak berlakunya sistem pemasyarakatan, narapidana sebagai warga negara yang telah melakukan suatu perbuatan tercela, namun hak-haknya sebagai warga negara tidaklah hapus atau hilang. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan secara tegas disebutkan sejumlah hak yang dimiliki oleh narapidana, salah satunya hak untuk menyampaikan keluhan.

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, *Dari Pemenjaraan Ke Pembinaan Narapidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1975. Hlm. 5

<sup>2</sup> Lukman Bratamidjaja, *Peningkatan Pembinaan Narapidana Melalui Optimalisasi Bulan Tertib Pemasyarakatan*, Pusat Kajian Dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum Dan HAM, Jakarta, Hlm. 2

Dalam lembaga pemasyarakatan seringkali terjadi kerusuhan yang disebabkan oleh karena hak-hak narapidana tidak diperhatikan oleh petugas lapas. Pada tanggal 11 Juli 2013 terjadi kerusuhan dan pembakaran lembaga pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan oleh narapidana. Penyebab kerusuhan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta, Medan, dipicu oleh masalah listrik dan air yang padam. Narapidana menyampaikan keluhan air dan listrik, namun tidak diperhatikan, sehingga mengakibatkan kerusuhan di Lembaga pemasyarakatan.<sup>3</sup> Selain itu di Kuningan, seorang narapidana di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan menusuk rekannya sesama napi, narapidana tersebut mengaku nekat menusuk sesama warga binaan karena merasa terancam<sup>4</sup>. Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan bahwa perlindungan serta pemenuhan terhadap hak narapidana belum dipenuhi khususnya mengenai hak narapidana dalam menyampaikan keluhan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah realisasi hak narapidana untuk menyampaikan keluhan atas perlakuan sesama narapidana di lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Wirogunan?

---

<sup>3</sup><http://birokrasi.kompasiana.com/2013/08/21/kerusuhan-di-lapas-indonesia-apa-yang-terjadi-dengan-lapas-di-negara-kita-585888.html>, 22 Mei 2014

<sup>4</sup><http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/14/04/14/n40wwj-napi-lapas-kuningan-bentrok-dua-terluka>, 22 Mei 2014

2. Apakah faktor-faktor penghambat realisasi hak narapidana untuk menyampaikan keluhan atas perlakuan sesama narapidana di lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan?

### **C. Pembahasan**

Secara yuridis pengertian narapidana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 7 (tujuh) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Terpidana itu sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud narapidana adalah setiap individu yang telah melakukan pelanggaran hukum yang berlaku dan kemudian diajukan ke pengadilan, dijatuhi vonis pidana penjara dan kurungan oleh hakim, yang selanjutnya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani masa hukumannya.

Bertitik tolak dari Pasal 1 angka 3 (tiga) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, bahwa lembaga pemasyarakatan "penjara" dapat diartikan sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Orang-orang yang terpenjara dimaksud terdiri atas:

1. Nara pidana



2. Orang-orang yang ditahan untuk sementara
3. Orang-orang yang disandera.
4. Orang-orang lain yang dimasukkan dengan perintah walaupun tidak menjalani pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Permasalahatan Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 1 butir 1 menjelaskan bahwa pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan Anak Didik Permasalahatan. Menurut Romli Atmasasmita, rumah penjara sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara saat itu dibagi dalam beberapa bentuk antara lain:

1. *Tuchtuis* adalah rumah penjara untuk menjalankan pidana yang sifatnya berat.
2. *Rasphuis* adalah rumah penjara dimana kepada para terpidana diberikan pelajaran tentang bagaimana caranya melicinkan permukaan benda-benda dari kayu dengan menggunakan ampelas.<sup>5</sup>

Ide pemasyarakatan bagi terpidana, menurut Sahardjo adalah sebagai berikut:

1. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia.
2. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang diluar masyarakat.
3. Narapidana hanya dijatuhi hukuman hilang kemerdekaan bergerak.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Romli Atsasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1982.

Struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan berubah dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.01.-PR.07.03 tahun 1985 dalam Pasal 4 ayat (1) diklasifikasikan dalam 3 kelas. Lembaga pemasyarakatan diklasifikasikan ke dalam 3 kelas, yaitu:

1. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I,
2. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A,
3. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B.

Pasal 14 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan merupakan landasan yuridis perlindungan hak-hak narapidana .Adapun hak-hak narapidana selama menjalani sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai berikut:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;

---

<sup>6</sup> Koesnan, R.A. *Politik Penjara Nasional*, Bandung: Sumur Bandung, 1961, hlm. 8

12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara internasional pengaturan terhadap hak narapidana diatur dalam *Standard Minimum Rules For the Treatment of Prisoners* dan Pasal 7 Konvensi hak-hak sipil dan politik. Dalam *Standard Minimum Rules For the Treatment of Prisoners* yang disepakati oleh Kongres PBB di Jenewa 1995, dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial tahun 1957, disebutkan beberapa hak narapidana antara lain:

1. *Access to court*
2. *Protection From Cruel and unusual*
3. *Civil rights*
4. *Protection of rights in decisions when adverse consequences are possible.*<sup>7</sup>

Hak narapidana dalam menyampaikan keluhan merupakan salah satu hak warga binaan yang dilindungi oleh Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Hak narapidana ini termasuk dalam Pasal 14 angka 1 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang menyatakan:

---

<sup>7</sup> Petrus Irawan Pandjaitan, *Standard Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*, media tirta, jakarta, 2008. hlm. 20

1. Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak menyampaikan keluhan kepada kepala lembaga pemasyarakatan atas perlakuan petugas atau sesama narapidana terhadap dirinya.
2. Keluhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan apabila perlakuan tersebut benar-benar dirasakan dapat mengganggu hak asasi atau hak-hak narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang bersangkutan atau narapidana dan anak didik pemasyarakatan lainnya.
3. Keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib lembaga pemasyarakatan.
4. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan penyelesaian keluhan diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri.

Sel tahanan menurut narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan, Khusus untuk sel tahanan kasus tindak pidana korupsi dipisahkan dengan sel tahanan kasus-kasus tindak pidana konvensional. Selain itu terdapat pemisahan sel tahanan berdasarkan jenis kelamin (sel wanita dan pria) di lembaga pemasyarakatan kelas IIA wirogunan. Menurut penelitian yang penulis lakukan, sebagian besar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan relatif belum memahami hak-haknya sebagai seorang narapidana. Narapidana hanya mengetahui hak yang hanya bersifat umum saja seperti hak untuk mengurus PB (pembebasan bersyarat) bagi narapidana yang sudah menjalani masa hukuman satu tahun keatas, CB

(cuti bersyarat) bagi narapidana yang masih menjalani masa hukuman satu tahun kebawah, CMB (cuti menjelang bebas), hak untuk mendapatkan makanan, minuman, pakaian, hak untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan agamanya masing-masing dan hak untuk bekerja serta mendapatkan upah atau premi dari pekerjaannya. Kebanyakan ketidaktahuan mereka atas hak-hak sebagai seorang narapidana didasarkan pada alasan yang bermacam-macam. Ada yang memang tidak tahu sama sekali, ada yang mengatakan hanya mengetahui secara umum saja dan ada yang mengatakan bahwa ketidaktahuan mereka karena tidak ada sosialisasi tentang hak-hak narapidana kepada narapidana itu sendiri.

Terkait dengan hak menyampaikan keluhan narapidana, penulis menggolongkan berbagai keluhan narapidana di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan ke dalam tiga hal, yaitu keluhan narapidana terhadap sarana dan prasarana di lembaga pemasyarakatan, keluhan narapidana terhadap perlakuan petugas lembaga pemasyarakatan kepada narapidana, dan keluhan narapidana terhadap perlakuan narapidana lain.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada narapidana, terungkap bahwa para petugas lembaga pemasyarakatan Kelas II Wirogunan pada umumnya berlaku baik terhadap warga binaan pemasyarakatan. Hal ini tergambar melalui hasil kuesioner dari narapidana. Pada umumnya narapidana Kelas II Wirogunan Yogyakarta menyatakan bahwa narapidana tidak

mempunyai keluhan mengenai perlakuan petugas lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana dan akan tetapi terdapat 2 (dua) narapidana mempunyai keluhan mengenai perlakuan petugas lembaga pemasyarakatan. Adapun keluhan narapidana mengenai perlakuan petugas lembaga pemasyarakatan adalah perlakuan kasar atau pun menghardik narapidana. Perlakuan ini sering dilakukan petugas lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana Menurut hasil penelitian yang penulis temukan di lapangan untuk realisasi hak narapidana untuk menyampaikan keluhan atas perlakuan sesama narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA wirogunan Yogyakarta ini melalui 3 (tiga) tahap utama yaitu :

1. Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak menyampaikan keluhan secara langsung kepada kepala lembaga pemasyarakatan atas perlakuan petugas ataupun sesama narapidana terhadap dirinya yang bersifat urgent/fatal.
2. Keluhan tersebut di sampaikan secara lisan maupun tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib lembaga pemasyarakatan
3. Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam menyampaikan keluhan harus melalui masing-masing Pembina sebagai perantara untuk di sampaikan ke kepala lembaga pemasyarakatan atas keluhan yang di sampaikan oleh narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf simaswat, sampai saat ini ( 31 november 2014), jumlah petugas sipir yang bekerja di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan adalah sebanyak 185 pegawai. Mereka bekerja sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan, di mana waktu bekerja dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai pukul 11.30 WIB. Para petugas dan narapidana yang berada pada sel tahanan wajib untuk mengikuti sholat Duhur (sholat berjamaah). Setelah selesai melakukan sholat berjamaah, aktifitas kembali berjalan sebagaimana mestinya, di mana sipir kembali mengawasi aktifitas narapidana seluruhnya di Lembaga Pemasyarakatan tersebut secara bergantian.

Dalam memenuhi hak-hak narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan kelas IIA wirogunan yang berkaitan dengan hak narapidana yaitu perawatan kesehatan, perlengkapan tidur, pakaian dan makanan, sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Menurut staf simaswat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan hambatan-hambatan dalam realisasi hak menyampaikan keluhan narapidana yaitu :

1. Kurangnya pemahaman narapidana terhadap sosialisasi yang disampaikan tentang hak-hak narapidana itu sendiri.
2. Belum adanya peningkatan terhadap sistem kinerja Lembaga pemasyarakatan yang mampu menanggulangi keluhan-keluhan narapidana atau anak didik secara menyeluruh.



3. Karena minimnya jumlah petugas sipir tidak sesuai dengan jumlah narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan.
4. Karena kurangnya pengawasan dan pengamatan terhadap lembaga pemasyarakatan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat yang seharusnya sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) harus dilakukan pengawasan dan pengamatan oleh Hakim pengawas dan pengamatan secara rutin 3 bulan sekali.

Dalam prakteknya narapidana dapat menyampaikan keluhannya pada pihak Lembaga Pemasyarakatan maupun pihak luar Lembaga Pemasyarakatan seperti keluarga, kerabat, Pengacara maupun Hakim Pengawas dan Pengamat. Hal ini disebabkan karena adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam menyampaikan maupun penanggulangan keluhan narapidana, yaitu kesejahteraan pegawai yang masih minim, kuantitas pegawai yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang sangat besar, kualitas pegawai yang rendah, sarana dan prasarana serta anggaran yang sangat minim sehingga keluhan narapidana tidak dapat terselesaikan dengan tuntas.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan maka dapat diambil suatu kesimpulan:



1. Realisasi hak-hak narapidana untuk menyampaikan keluhan atas perlakuan sesama narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA kurang terpenuhi karena ada sebagian hak narapidana dalam menyampaikan keluhan mendapat kendala, antara lain : masih adanya kekerasan yang terjadi didalam lembaga pemasyarakatan yang di lakukan antar sesama narapidana maupun oknum dari petugas lapas terhadap narapidana, kurang terbuka antar sesama narapidana untuk menyampaikan keluhan salah satunya kekerasan sesama narapidana maupun kekerasan yang di lakukan oleh oknum petugas lapas terhadap narapidana.
2. Faktor faktor penghambat dalam menyampaikan keluhan terhadap perlakuan sesama narapidana yaitu:
  - a. Kurangnya pemahaman narapidana terhadap sosialisasi yang disampaikan tentang hak-hak narapidana itu sendiri.
  - b. Belum adanya peningkatan terhadap sistem kinerja Lembaga pemasyarakatan yang mampu menanggulangi keluhan-keluhan narapidana atau anak didik secara menyeluruh.
  - c. Karena kurangnya pengawasan dan pengamatan terhadap lembaga pemasyarakatan yang dilakukan dan pembinaan dan pengawasan yang seharusnya sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) harus dilakukan lembaga pemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU**

Koesnan, R.A., 1961, *Politik Penjara Nasional*, Penerbit Bandung Sumur, Bandung

Lukman Bratamidjaja, *Peningkatan Pembinaan Narapidana Melalui Optimalisasi Bulan Tertib Pemasyarakatan*, Pusat Kajian Dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum Dan HAM, Jakarta.

Petrus Irawan Pandjaitan, 2008, *Standard Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*, media tirta, Jakarta.

Romli Atsasma, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung

Romli Atmasasma, 1975, *Dari Pemenjaraan Ke Pembinaan Narapidana*, Penerbit Alumni, Bandung

### **WEBSITE**

<http://birokrasi.kompasiana.com/2013/08/21/kerusuhan-di-lapas-indonesia-apa-yang-terjadi-dengan-lapas-di-negara-kita-585888.html>, 22 Mei 2014

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/14/04/14/n40wwj-napi-lapas-kuningan-bentrokan-dua-terluka>, 22 Mei 2014